

PERSEPSI MAHASISWA TERHADAP MATA KULIAH PENDIDIKAN PANCASILA DI IKIP PGRI BOJONEGORO

Oleh : **Neneng Rika Jazilatul Kholidah**

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Fakultas Pendidikan dan Ilmu Pengetahuan Sosial
IKIP PGRI Bojonegoro, Jalan Panglima Polim No. 46 Bojonegoro
e-mail : jazilarika@yahoo.co.id

ABSTRAK

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui persepsi mahasiswa pada seluruh program studi di IKIP PGRI Bojonegoro. Penelitian ini akan dilaksanakan pada mahasiswa yang sudah mengampu mata kuliah Pendidikan Pancasila, metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Teknik sampling yang digunakan menggunakan *purpose sampling*. Populasi dalam penelitian ini adalah dosen pengampu mata kuliah pendidikan pancasila dan mahasiswa dari seluruh program studi. Dari penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa eksistensi mata kuliah Pendidikan Pancasila secara substansi nilainya masih ada dan eksistensinya dalam Pendidikan Pancasila di perguruan tinggi menjadi mata kuliah wajib yang harus ditempuh oleh mahasiswa semua program studi dan Pendidikan Pancasila tidak hanya cukup dipelajari di jenjang sekolah dasar namun di pendidikan tinggi pun harus tetap mempelajarinya.

Kata Kunci: Persepsi, Pendidikan Pancasila, Mahasiswa IKIP PGRI Bojonegoro.

ABSTRACT

The Purpose of this research is to know the perceptions of student in all course in IKIP PGRI Bojonegoro. This research is aimed at student who have been teaching Pancasila Education course in all study programs. The research method used in this research is qualitative descriptive method. The form of research in this study is the perception of all students from the study program. The sampling technique used using purpose sampling. Population in this research is lecturer of Pancasila Education courses and students from the study program. From this research, it can be concluded that the existence in Pancasila Education in university becomes a compulsory course that must be pursued by students of all study programs and Pancasila Education is not only be studied in elementary school level but also in high education they must still learn it,

Keywords : Perception, Pancasila Education, Student of IKIP PGRI Bojonegoro

PENDAHULUAN

Pendidikan mempunyai peranan yang sangat strategis di dalam pembangunan suatu bangsa. Pendidik merupakan salah satu kebutuhan bagi manusia, yang bertujuan untuk membentuk manusia yang baik dan berakhlak yang sesuai dengan cita-cita bangsa disamping itu juga sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung di masyarakat serta mencerdaskan bangsa. Pendidikan wajib merata, berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan dari masyarakat.

Pendidikan Pancasila adalah suatu usaha dimana pendidik menginginkan anak didiknya menjadi manusia yang terarah melalui pendidikan formal, untuk mentransformasikan nilai-nilai yang terkandung dalam pendidikan pancasila diharapkan dapat mencerna nilai-nilai yang ada dalam pendidikan pancasila tersebut sehingga mampu berfikir secara rasional dan realistis sesuai dengan kemampuannya masing-masing, sehingga mereka mampu mencapai perkembangan secara optimal yang dijiwai dalam pancasila(Sylvestor dan Andreas, 2010 :1).

Krisis multi dimensi yang dipraktekkan oleh para pejabat yang ada di negara beserta para kroni-kroninya menjadikan pertanyaan besar khususnya bagi para mahasiswa diperguruan tinggi yang merupakan generasi bangsa, mengapa para pemimpin melakukan praktek yang sangat menyimpang dari tatanan kehidupan di negeri yang berazaskan Pancasila, bukankah pemimpin itu adalah orang-orang yang pernah mempelajari pendidikan pancasila di perguruan tinggi. Disamping itu tidak hanya prakterk korupsi, kolusi dan nepotisma tetapi pertikaian antar umat beragama menjadikan bukti bahwa masyarakat belum bisa hidup secara berdampingan.

Dalam undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Pasal 35 ayat (3) menyatakan, bahwa : "Kurikulum Pendidikan Tinggi wajib memuat mata kuliah : Pendidikan Agama, Pendidikan Pancasila, Pendidikan Kewarganegaraan dan Bahasa Indonesia. Sementara itu , Kepdirjen Dikti No. 42 Tahun 2003 yang diganti dengan Kepdirjen Dikti No. 43 tahun 2006 tentang rambu-rambu pelaksanaan

Kelompok mata kuliah pengembangan kepribadian di Perguruan Tinggi meliputi Pendidikan Agama, Pendidikan Bahasa dan Pendidikan Kewarganegaraan (Budi Juliardi, 2014 : 11).

Dengan penyelenggaraan Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi, diharapkan terciptanya wahana pembelajaran bagi para mahasiswa untuk akademik mengkaji, menganalisis, dan memecahkan masalah-masalah pembangunan bangsa dan negara dalam perspektif nilai-nilai dasar Pancasila sebagai ideologi dan dasar Negara Republik Indonesia. Pendidikan Pancasila sebagai bagian dari Pendidikan Nasional yang merupakan rangkaian konsep, program, tata cara dan usaha untuk mewujudkan tujuan nasional yang diamanatkan Undang-undang Dasar Tahun 1945, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi tujuan menyelenggarakan Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi pun merupakan bagian dari upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa (Materi Ajar Mata Kuliah Pendidikan Pancasila). Selain itu dengan pendidikan pancasila ini diharapkan mahasiswa memiliki

pandangan dan komitmen terhadap nilai-nilai demokrasi dan HAM, mencegah dan menghentikan berbagai tindak kekerasan dengan cara cerdas dan damai, mampu berpartisipasi serga menyelesaikan berbagai macam konflik di masyarakat dengan dilandasi nilai-nilai moral, agam dan nilai-nilai universal.

Menurut As'ad Said Ali (2009: 2) "pengetahuan masyarakat mengenai pancasila seolah sedang memasuki masa surut". Hal tersebut demikian sebagai penanda bahwa mulai terjadinya tergesernya pengetahuan mengenai pancasila meskipun tingkat penerimaan masyarakat dirasa masih cukup memadai. Menurunnya pengetahuan dan pemahaman terkait pancasila dikalangan masyarakat khususnya bagi mahasiswa bukan hanya sebuah wacana yang tabu, akan tetapi perlu dicari penyebabnya kemudian ditindak lanjuti.

Dalam hal ini Pendidikan Pancasila memiliki kedudukan yang sangat penting, yang mana diharapkan mampu membentuk kepribadian manusia Indonesia, yaitu kepribadian yang dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila, karena Pendidikan Pancasila diberikan

pada setiap tingkat dan jenjang pendidikan formal, menanggapi hal tersebut dikarenakan pentingnya membangun karakter kebangsaan dalam pribadi setiap mahasiswa. (Sylvestor dan Andreas, 2010 :2).

Berdasarkan paparan diatas peneliti mengambil judul “Persepsi Mahasiswa Terhadap Mata Kuliah Pendidikan Pancasila Di IKIP PGRI Bojonegoro”

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deksriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan cara kuesioner, wawancara, observasi dan analisis dokumentasi. Peneliti menggunakan dua triangulasi yaitu triangulasi data dan triangulasi metode, dengan triangulasi data peneliti mencocokkan hasil wawancara mahasiswa dengan dosen pengampu mata kuliah sedangkan triangulasi metode yaitu dengan mengumpulkan data sejenis metode wawancara dan penyebaran kuesioner. Sampel yang dipilih berasal dari Dosen Pengampu dan Mahasiswa yang dianggap

mengetahui masalah yang berkaitan dengan penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Eksistensi Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi

Pada tahun 2013 Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan akan merubah kurikulum dari pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi. Sesuai dengan Undang-undang No 12 Tahun 2012 bahwa perguruan tinggi memiliki otonomi dalam penyusunan kurikulum, namun dalam hal ini perlu adanya sebuah rambu-rambu supaya senada dan mencapai hasil yang optimal. Pendidikan Pancasila saat ini masih diajarkan di semua program studi di IKIP PGRI Bojonegoro. Hal ini dituturkan oleh Bu Ernia Duwi Saputri, S.Pd.,M.H dalam wawancara tanggal 23 Oktober 2017 pada pukul 14.00 WIB di Kantor Prodi PPKn:

“Pendidikan Pancasila merupakan mata kuliah inti untuk pembentukan moral bangsa, namun sayang sekali di sekolah tingkat dasar materi Pancasila merupakan bagian dari pelajaran PKN, akan tetapi di perguruan tinggi semua jurusan wajib mendapatkan mata kuliah Pendidikan Pancasila”.

Pendidikan Pancasila sebagai mata kuliah yang tidak tercantum dalam kurikulum UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas berlaku untuk semua jenjang pendidikan mulai dari tingkat Sekolah Dasar hingga Perguruan Tinggi. Demikian penurutan dari salah satu dosen Program Studi Pendidikan Ekonomi Dr. Eka Farida, S.E., M.Pd dalam wawancara tanggal 26 Oktober 2017 pukul 14.00 WIB di kantor Program Studi Ekonomi:

“Pendidikan Pancasila masih tetap eksis, meskipun Pendidikan Ekonomi satu Fakultas dengan Program Studi PPKn namun kaprodi kami tetap mengambil dosen PPKn untuk mengajarkan mata kuliah Pendidikan Pancasila sebagai profesionalitas seorang dosen”.

Dari hal tersebut diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Pendidikan Pancasila diajarkan di semua program studi yang ada di IKIP PGRI Bojonegoro dan sebagai mata kuliah wajib, dikarenakan pendidikan tinggi sebagai wadah mencetak generasi penerus bangsa yang berkualitas sebagai upaya pengenalan kepada mahasiswa bahwa Pancasila adalah dasar negara yang merupakan dari sebuah sumber dari segala sumber

hukum dalam pembentukan peraturan yang ada di negara.

Persepsi Mahasiswa

Untuk mengetahui persepsi mahasiswa terhadap mata kuliah Pendidikan Pancasila di IKIP PGRI Bojonegoro, langkah pertama dilakukan adalah menggunakan kuesioner atau angket.

1) Persepsi mahasiswa tentang Pendidikan Pancasila di perguruan tinggi

Persepsi mahasiswa terhadap pendidikan pancasila di perguruan tinggi yang dimaksud adalah apakah mata kuliah pendidikan pancasila perlu diajarkan di perguruan tinggi.

Prosentase	Kualifikasi
50,8	Perlu
32,2	Sangat perlu
10,0	Kurang perlu
7,0	Tidak perlu

(Sumber : Data Sekunder dari Kuesioner/Angket)

Dari 150 responden sebanyak 32,2% menyatakan “sangat perlu”, sebanyak 50,8% menyatakan perlu, sebanyak 10% kurang perlu dan 7% menyatakan tidak perlu. Dari hasil tersebut dapat ditarik suatu sistesis bahwa para

responden menyatakan bahwa mata kuliah Pendidikan Pancasila perlu diajarkan dijenjang perguruan tinggi.

2) Permasalahan-permasalahan dalam materi Pendidikan pancasila

Penyebaran angket dilakukan sebelum membahas permasalahan dalam materi pada mata kuliah Pendidikan pancasila di IKIP PGRI Bojonegoro. hasil perolehan angket sebagai berikut :

Tabel 7. Persepsi mahasiswa terhadap materi Pendidikan Pancasila

Prosentase	Kualifikasi
35,7	Menarik
16,3	Sangat menarik
30,0	Kurang menarik
18,0	Tidak menarik

(Sumber : Data Sekunder dari Kuesioner/Angket)

a) Sebanyak 150 kuesioner tersebar di seluruh program studi di IKIP PGRI Bojonegoro, Hasil kuesioner/angket menunjukkan bahwa sebanyak 35,7% materi dalam mata kuliah Pendidikan Pancasila dinyatakan menarik. Jumlah prosentasi kurang dari setengah jumlah prosentase. Dikarenakan dalam pembelajaran mata kuliah Pendidikan Pancasila sudah menggunakan metode

presentasi kelompok dan ada beberapa materi yang disampaikan oleh dosen menggunakan metode audio visual.

b) Sedangkan sejumlah 30,0 % menyatakan bahwa materi Pendidikan Pancasila adalah kurang menarik, disini yang dimaksud adalah materinya terlalu padat.

c) Sebanyak 18,0% menyatakan tidak menarik. Hal ini didasarkan bahwa kurangnya variasi dalam penyampaian materi

d) Dan sebanyak 16,3 % menyatakan sangat menarik, hal ini sesuai dengan pengalaman mahasiswa yang sebelumnya sudah memahami materi dari buku-buku yang dimiliki, dari internet dan dari berbagai seminar-seminar yang pernah diikuti.

Setelah diperoleh prosentasi mengenai gambaran materi Pendidikan Pancasila, kemudian melalui penelusuran wawancara kepada beberapa mahasiswa selaku informan diperoleh hasil sebagai berikut :

- (1) Ada beberapa materi yang sudah disampaikan melalui presentasi kelompok dan melalui audio visual
- (2) Materi tentang Pancasila padat, kurang menarik

- (3) Beberapa mahasiswa sudah memiliki referensi berupa buku-buku, sumber internet dan hasil seminar terkait dengan Pancasila
- (4) Secara totalitas masih perlu ditingkatkan dalam menyampaikan materi dengan berbagai metode yang bervariasi.

SIMPULAN

Hasil penelitian yang sudah dilaksanakan melalui metode analisis data, maka dapat ditarik kesimpulan ;

1. Persepsi dosen
 - a. Eksistensi Pendidikan Pancasila di IKIP PGRI Bojonegoro
Eksistensi mata kuliah Pendidikan Pancasila secara substansi nilainya masih ada dan eksistensinya dalam Pendidikan Pancasila di perguruan tinggi menjadi mata kuliah wajib yang harus ditempuh oleh mahasiswa semua program studi yang ada di IKIP PGRI Bojonegoro.
 - b. Pendidikan Pancasila diperlukan dalam tataran pendidikan tinggi
Bahwa Pendidikan Pancasila diperlukan dalam jenjang Pendidikan Tinggi, dikarenakan pendidikan tinggi sebagai wadah mencetak generasi penerus bangsa

yang berkualitas. Sehingga disini Pendidikan Pancasila diberikan sebagai upaya pengenalan kepada mahasiswa bahwa Pancasila adalah dasar negara yang merupakan dari sebuah sumber dari segala sumber hukum dalam pembentukan peraturan yang ada di negara.

2. Persepsi mahasiswa

Karena dengan Pancasila akan menumbuhkan jiwa Nasionalisme yang tinggi dan rasa toleransi terhadap sesama

Pancasila tidak hanya cukup dipelajari di jenjang sekolah dasar namun di pendidikan tinggi pun harus tetap mempelajari

3. Permasalahannya dalam materi Pendidikan Pancasila di perguruan tinggi, yakni :

- a. Ada beberapa materi yang sudah disampaikan melalui presentasi kelompok dan melalui audio visual
- b. Materi tentang Pancasila padat, kurang menarik
- c. Beberapa mahasiswa sudah memiliki referensi berupa buku-buku, sumber internet dan hasil seminar terkait dengan Pancasila

- d. Secara totalitas masih perlu ditingkatkan dalam menyampaikan materi dengan berbagai metode yang bervariasi

DAFTAR RUJUKAN

- As'Said Ali. 2009. *Negara Pancasila : Jalan Kemaslahatan Berbangsa*. Jakarta :Pustaka LP3ES Indonesia.
- Budi Juliardi. 2014. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta. PT Rajagrafindo Persada.
- Sylvestor, Andreas. 2010. *Pandangan atau tanggapan akhir peserta mata kuliah Pendidikan Pancasila terhadap Pendidikan di UNPAR*. LPPM : UNPAR.
- Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi,. 2003. *Model Acuan Proses Pembelajaran Mata kuliah Pengembangan Kepribadian*. Jakarta : Depdiknas.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.